**Ada Kelalaian Kesbang dalam Dana Hibah PBVSI**



Ilustrasi : [bursakerja.denpasarkota.go.id](https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPyt7LOowccCFYNSjgodnn4M4w&url=http%3A%2F%2Fbursakerja.denpasarkota.go.id%2Fkoni%2Fdetil-pengkot-cabor.php%3Fid%3D12&ei=vtfaVfzWEIOluQSe_bGYDg&psig=AFQjCNF3IR1mSGuHXs3lCanWc5pMCymgkA&ust=1440491837366632)

**TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -** Penasihat hukum Iriantoko Cahyo Dumadi, terdakwa korupsi dana hibah Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Yogyakarta mempertanyakan fungsi pengawasan Kantor Kesbang POR.

Bastary Ilyas mencecar Kepala Kesbang POR Kota Yogyakarta, Sukamto terkait sejauhmana tugas pengawasan dana hibah yang dikucurkan oleh KONI Kota Yogyakarta sesuai dengan tupoksinya.

Majelis hakim yang membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yogyakarta juga menyebutkan lemahnya fungsi pengawasan oleh Kesbang POR dalam penggunaan kucuran dana hibah KONI Kota Yogyakarta.

"Di LHP BPK ini juga disebutkan peran Kesbang kurang optimal," sebut Hakim Ketua Suyanto.‬

"Atas rekomendasi dari LHP BPK itu, dana sudah dikembalikan semua oleh KONI melalui dua tahap," ujarnya.

Selebihnya, saat Sukamto dicecar pertanyaan oleh hakim seputar dana hibah yang diterima PBVSI di tahap pertama 2012 sebesar Rp646 juta, ia banyak mengelak dengan menjawab lupa dan tidak tahu.

Termasuk penyimpangan uang hibah Rp537,49 juta yang justru dialihkan untuk membiayai klub bola voli Yuso ikuti turnamen Pro Liga dan untuk membiayai klub sepak bola PSIM.‬

"Hasil audit internal KONI tak ada temuan itu. Saya baru dengar setelah diberitahu pak ketua dan membaca LHP BPK," ujarnya.‬**(tribunjogja.com)**

Sumber berita:

* jogja.tribunnews.com : Ada kelalaian Kesbang dalam Dana Hibah PBVSI, Rabu, 8 Juli 2015.
* Tempo, tanggal 8 Juli 2015.

Catatan Berita:

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, pemuda dan olahraga. Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, pemuda dan olahraga.